



Pemerintah Kota Blitar

RENCANA KERJA 2026

DINAS SOSIAL KOTA BLITAR



www.dinsos.blitarkota.go.id



Jl. Jawa No. 64A Kota Blitar



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

e.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.
7. Rencana Pembangunan tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan/atau subkegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja-PD tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada RKPD.

- (3) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal 3

- (1) Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - BAB V : Penutup
- (2) Rincian Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar;
- b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- c. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
- d. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar;
- e. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar;
- f. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;
- g. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
- h. Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Blitar;
- i. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar;
- j. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
- k. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar;
- l. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
- m. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar;
- n. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar;
- o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar;

- p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar;
- q. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar;
- r. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar;
- s. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar;
- t. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar;
- u. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar;
- v. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar;
- w. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
- x. Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar;
- y. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;
- z. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar;
- aa. Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- bb. Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- cc. Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar; dan
- dd. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

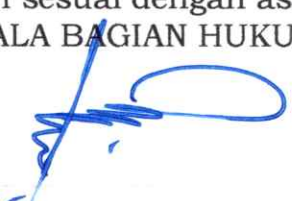
Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Agustus 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

8. RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA BLITAR TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Disamping itu penyusunan Renja Perangkat Daerah diselaraskan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat maupun Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) juga mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan. Review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan pencapaian target kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara ringkas penyusunan Renja Tahun 2026 Dinas Sosial Kota Blitar terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:

- a. Tahapan Persiapan; meliputi proses
 - 1) Pembentukan SK tim penyusun renja
 - 2) Orientasi tim kerja
 - 3) Penyusunan agenda tim kerja
 - 4) Penyiapan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Blitar.
- b. Tahapan Penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2026; meliputi proses :
 - 1) Penyusunan mengacu pada rancangan awal RKPD Kota Blitar 2026 dan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025-2029 yang mengacu kepada RPJMD Kota Blitar 2025- 2029 serta Rencana Kerja Kementerian Sosial tahun 2026
 - 2) Evaluasi program dan kegiatan tahun 2025
 - 3) Pemecahan masalah yang sedang dihadapi
 - 4) Usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
- c. Pelaksanaan Forum OPD.

Dilakukan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan pelaksanaan forum SKPD adalah untuk :

 - 1) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan;
 - 2) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

- 3) Penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - 4) Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Perangkat Daerah, sesuai dengan surat edaran Walikota Blitar tentang rancangan awal RKPD.
- d. Penetapan Renja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2026

Proses penetapan Renja Dinas Sosial Kota Blitar dilakukan setelah adanya penetapan RKPD Kota Blitar Tahun 2026. Langkah terakhir proses dari penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Blitar adalah melakukan penyempurnaan berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap Renja Dinas Sosial Kota Blitar oleh tim penyusun RKPD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Blitar sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Blitar kepada Walikota Blitar melalui Bappeda Kota Blitar untuk mendapatkan pengesahan, dan selanjutnya Renja Perangkat Daerah ini digunakan sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS dan RAPBD tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Sosial Kota Blitar ini adalah :

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
- d. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);

- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- i. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- n. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 19);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- p. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Nomor 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

- v. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
- w. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- x. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2);
- y. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);
- z. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Menengah Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5 tambahan lembaran daerah nomor 5);
- aa. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 49);
- bb. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2025 nomor 23);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2026 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2026.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2026 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
		3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
		1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Blitar
		1.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	:	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dengan capaiannya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap Renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Adapun tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025
Kota Blitar

Nama PD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Th 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Th 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025	
					Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Th 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
	Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85,08 Nilai	84,96	86,04	86,04	100,00	86,44	86,44	101,60
	Sasaran 1 : Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85,08 Nilai	84,96	86,04	86,04	100,00	86,44	86,44	101,60
106.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,6 Indeks	83,10	83,70	88,9	106,21	89	89	105,2
106.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan	100%	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Th 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Th 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025	
					Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Th 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar								
106.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	12	6	6	100	7	25	100
106.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 Laporan	24	12	12	100	12	48	100
106.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100	100	100	100	100	100	100
106.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ bulan	25	26	26	100	26	26	100
106.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	48 Laporan	24	12	12	100	12	48	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Th 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Th 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025	
					Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Th 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100	100	100	100	100	100	100
106.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	4	2	2	100	1	7	87,5
106.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	25	26	26	100	26	26	100
106.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100.00	100	100	100	100	100	100
106.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1	1	1	100	1	3	75,00
106.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3	3	3	100	4	10	83,33
106.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	5	5	5	100	6	16	80,00
106.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	12	12	12	100	13	37	92,50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Th 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Th 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025	
					Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Th 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2	1	1	100	1	4	100
106.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	24	12	12	100	12	48	100
106.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	106	45	36	80	30	146	91,25
106.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Dokumen	0	0	0	0	2000	2000	100
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100	100	100	100	100	100	100,00
1.06.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	1	0	0	0	1	2	100
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	4	6	6	100	7	17	212,5
106.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Th 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Th 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025	
					Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Th 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192 Laporan	96	48	48	100	48	192	100
106.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Laporan	26	13	13	100	13	52	100
106.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100	100	100	100	100	100	100
106.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	15	15	15	100	15	15	88,24
106.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	1	0	0	100	1	2	16,66
106.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	50	40	40	100	50	140	87,5
106.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	1	1	100	1	1	100,00
106.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	0	0	0	1	1	1	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Th 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Th 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025	
					Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Th 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan 2 : Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Indikator 1 : Indeks keparahan kemiskinan	0,21 Indeks	0,12	0,23	0,24	95,65	0,22	0,22	95,24
		Indikator 2 : Persentase PPKS	7,04%	7,25	6,73	6,71	100,30	6,23	6,23	111,51
	Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan PPKS	Indikator 1 : Persentase fakir miskin yang berdaya	3,24%	1,86	2,70	2,70	100	3,00	3,00	92,59
		Indikator 2 : Persentase penurunan PMKS	5,89%	5,25	6,49	6,44	99,23	1,52	7,81	132,55
		Indikator 3 : Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	94,11%	89,90	93,09	94,43	101,44	94,60	94,60	100,52
106.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100	100	100	100	100	100	100,00
106.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100%	100	100	100	100	100	100	100,00
106.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	8	6	6	100	5	5	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Th 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Th 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025	
					Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Th 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Peningkatan PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	19,69%	17,25	0,89	0,89	100	0,88	19,02	96,60
106.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100	100	100	100	100	100	100,00
106.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	145 Orang	125	130	130	100	135	135	93,10
106.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	21	10	10	100	30	61	71,76
106.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0	0	0	0	14	14	70

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Th 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Th 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025	
					Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Th 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	540 Orang	156	325	325	100	337	818	151,48
106.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	0	0	0	0	201	201	87,39
106.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	0	0	0	0	9	9	47,36
106.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	0	0	0	0	35	35	46,67
106.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Orang	0	0	0	0	50	50	47,62

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Th 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Th 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025	
					Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Th 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.04.2.01.0011	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	0	0	0	0	5	5	41,66
106.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	256 Orang	125	45	45	100	20	190	74,22
106.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Peningkatan PMKS terlatih	160%	90,83	19,5	20,52	105,23	16,30	163,33	102,08
		Persentase penurunan Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	6,81%	12,98	1,4	0,73	52,14	1,42	28,32	434,95
106.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval	100%	100	100	100	100	100	100	100,00
		Persentase PMKS terlatih	100%	54,50	20	23,50	117,50	20	98	98
		Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100%	100	100	100	100	100	100	100,00
106.05.2.02.0001	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	400 Keluarga	337	400	735	183,75	100	1172	293
106.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.264 Keluarga	9.584	9.514	9.514	100	7.774	7.774	124,30

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Th 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Th 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025	
					Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Th 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	218	80	94	117,5	80	392	98
106.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	100%	100	100	100	100	100	100	100,00
106.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100%	100	100	100	100	100	100	100,00
106.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	33	40	13	32,5	30	76	63,33
106.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	130	60	60	100	70	260	92,86
106.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	100%	81,48	90	81,48	90,53	94	94	90,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Th 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Th 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025	
					Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Th 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	27	27	27	100	27	27	100
106.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP dalam kondisi baik	100%	100	100	100	100	100	100	100,00
106.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	100%	100	100	100	100	100	100	100,00
106.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	980 Makam	975	980	981	100,10	985	985	100,51

Dari 6 program dan 13 kegiatan dapat disampaikan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan :

a. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pada program ini terdapat dua indikator yaitu persentase penurunan rumah tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial dan persentase peningkatan PMKS terlatih.

Dari dua indikator tersebut yang tidak memenuhi target pada tahun 2024 adalah persentase penurunan rumah tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 jumlah penerima bantuan sosial sebanyak 9.584 KPM dan tahun 2024 sebanyak 9.514 KPM sehingga menurun 70 KPM atau sebesar 0,73%. Target persentase penurunan rumah tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial tahun 2024 sebesar 1,4% sehingga capaian 52,14% atau belum tercapai. Namun demikian apabila dibandingkan dengan target Renstra (6,81%) persentase penurunan rumah tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial sejak 2022-2024 telah tercapai sebesar 13,62%.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya capaian kinerja ini adalah pemberian bantuan sosial belum disertai upaya mengembangkan ekonomi masyarakat secara kolaboratif antar instansi pemerintah maupun stakeholder terkait serta belum dilakukan pendampingan yang maksimal.

Kondisi ini akan berimplikasi terhadap adanya ketergantungan penerima manfaat terhadap bantuan pemerintah dan mengurangi motivasi untuk mencari pekerjaan atau meningkatkan taraf hidup secara mandiri.

Oleh karena itu pemberian bantuan sosial harus dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan minimal setahun sekali sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sehingga bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Disamping itu upaya pemberdayaan ekonomi Masyarakat miskin dan rentan perlu dilakukan secara kolaboratif antar instansi pemerintah dan stake holder terkait.

2. Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator kinerja program ini Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada tahun 2024 target IKM 83,70 realisasi 88,90 capaian kinerja 106,21%. Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indeks kepuasan penerima layanan terhadap layanan publik di bidang sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial atas 9 unsur yaitu persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, tarif/biaya, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara digital melalui SUKMA-E (Survei Kepuasan Masyarakat secara Elektronik) Jatim melibatkan responden sebanyak 528 orang dengan hasil IKM 88,90 (katagori SANGAT BAIK). Capaian tersebut juga sudah sudah memenuhi target Renstra 2021-2026 yang ditetapkan sebesar 84,6.

Kemudahan akses untuk memperoleh informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait persyaratan, system dan prosedur

pelayanan, sarana prasarana yang memadai serta dukungan petugas yang cekatan sangat mendukung terwujudnya pelayanan yang optimal.

Implikasi pelayanan publik yang baik akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengurangi konflik sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan proses keputusan dalam pembangunan.

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan pada 9 unsur layanan.

b. Program Pemberdayaan Sosial

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Sosial adalah Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tahun 2024 target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100,00%, sedangkan capaian kinerja terhadap target Renstra sebesar 100% (telah mencapai target). Kinerja ini diperoleh melalui monitoring dan evaluasi terhadap keaktifan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yaitu TKSK, PSM maupun LKS dalam layanan kesejahteraan sosial dan berdasarkan hasil monev sebanyak 44 PSM, 3 TKSK dan 10 secara keseluruhan dikategorikan aktif dalam kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.

Faktor pendukung tercapainya target kinerja ini adalah dukungan pemerintah dalam rangka meningkatkan peran PSKS dalam pelayanan sosial dilakukan melalui motivasi, komunikasi dan koordinasi yang harmonis, pembinaan/Bimtek serta pemberian apresiasi terhadap kinerja PSKS.

PSKS merupakan mitra Dinas Sosial dalam pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Implikasi keterlibatan PSKS dalam pelayanan kesejahteraan sosial akan mempermudah PPKS untuk mendapatkan akses layanan sosial lebih cepat, lebih baik dan efektif sehingga permasalahan PPKS cepat terselesaikan.

Untuk itu peningkatan kapasitas PSKS dalam pelayanan sosial perlu terus dilakukan baik melalui pembinaan, memberikan kesempatan untuk mengikuti Bimtek/Diklat pada setiap kesempatan serta memperluas jejaring kerja sama antar pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Indikator kinerja program ini adalah Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial, tahun 2024 target 0,89%, realisasi 0,89%, capaian kinerja 100%. Capaian kinerja dihitung berdasarkan peningkatan jumlah PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada tahun berjalan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial tahun 2023 sebanyak 562 orang, tahun 2024 sebanyak 567 orang, meningkat sebanyak 5 orang (0,89%). Sedangkan prediksi capaian terhadap target Renstra pada tahun 2025 sebesar 96,60% (target 19,69%, realisasi 19,02%). Jenis layanan rehabilitasi sosial diberikan sesuai dengan kebutuhan PPKS berdasarkan hasil assessment antara lain pemberian permakanan, penyediaan sandang, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PPKS maupun keluarganya, akses layanan kesehatan dan pendidikan, fasilitasi pembuatan dokumen administrasi kependudukan, penelusuran dan reunifikasi keluarga serta layanan rujukan ke Balai/UPT/LKS rehabilitasi sosial atau lembaga sejenis.

Keberhasilan program rehabilitasi sosial didukung oleh SDM kesejahteraan sosial yang kompeten, sinergi dan kolaborasi program antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, instansi dan stake holder terkait serta dukungan keluarga dan masyarakat.

Layanan rehabilitasi sosial yang optimal berimplikasi terhadap berkembang dan pulihnya fungsi sosial PPKS sehingga mereka bisa hidup layak dan bermartabat di masyarakat.

Agar layanan rehabilitasi sosial mendapatkan hasil yang optimal maka perlu dilakukan asesment yang mendalam terhadap permasalahan masing-masing PPKS sehingga intervensi layanan akan diberikan dengan tepat.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator kinerja program ini adalah persentase peningkatan PPKS terlatih, tahun 2024 target 19,5%, realisasi 20,52%, capaian kinerja 105,23%. Perhitungan kinerja berdasarkan perbandingan jumlah akumulasi peserta pelatihan keterampilan tahun berjalan dengan jumlah akumulasi peserta pelatihan periode tahun sebelumnya yaitu 458 orang di tahun 2023, meningkat sebanyak 94 orang menjadi 552 orang atau naik sebesar 20,52%.

Faktor pendukung keberhasilan program ini antara lain kebijakan pemerintah dalam program pemberdayaan sosial melalui pelatihan keterampilan dipilih jenis pelatihan yang bersifat mendasar, mudah diimplementasikan pasca pelatihan serta didukung oleh motivasi internal PPKS untuk berubah menuju lebih baik.

Program ini akan berimplikasi terhadap meningkatnya keterampilan PPKS yang dapat digunakan sebagai modal dasar untuk merintis usaha mandiri maupun bekerja di sektor informal sehingga diharapkan akan meningkatkan status sosial ekonominya.

Kedepan upaya pemberdayaan sosial PPKS melalui pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan peralatan usaha perlu dilakukan lebih selektif sehingga jenis pelatihan yang diikuti akan sesuai dengan bakat dan minat peserta agar hasilnya lebih optimal.

e. Program Penanganan Bencana

Indikator kinerja Program Penanganan Bencana adalah Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota tahun 2024 target 100%, realisasi 100%, capaian 100%. Target ini merupakan target tahunan dan capaian terhadap target Renstra tercapai 100%. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan melalui bantuan paket bahan makanan yang pada tahun 2024 sebanyak 13 orang secara keseluruhan sudah menerima paket bantuan.

Komitmen Pemerintah Kota Blitar yang didukung oleh penyediaan anggaran dan koordinasi yang efektif antar instansi/lembaga terkait akan menentukan keberhasilan program ini.

Implikasi pemberian bantuan paket bahan makanan ini akan membantu meringankan beban hidup korban bencana untuk memenuhi kebutuhan pangan pada masa tanggap darurat.

Dalam rangka penyusunan perencanaan anggaran, kedepan diperlukan identifikasi yang lebih mendalam terhadap kebutuhan dasar korban bencana, tidak hanya melulu kebutuhan makanan tetapi juga kebutuhan dasar lainnya.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)

Indikator kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah persentase TMP dalam kondisi baik, tahun 2024 target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100,00%. Dari target Renstra 100% pada tahun 2024 sudah tercapai 100%. Pemeliharaan TMP Raden Wijaya di Kota Blitar merupakan salah satu fungsi mandatori yang diemban Dinas Sosial dimana pemeliharanya meliputi kebersihan, penyediaan bahan, alat dan sarana kebersihan serta pemeliharaan bangunan serta sarana prasarana di lingkungan TMP. Dukungan pemeliharaan TMP berupa penyediaan bahan dan alat kebersihan, penyediaan anggaran untuk pemeliharaan makam dan bangunan pendukungnya berdasarkan kebutuhan. Disamping itu juga tersedianya tenaga penjaga TMP sehingga perawatan dilakukan setiap hari.

Pemeliharaan TMP yang optimal akan berimplikasi terhadap terjaganya TMP selalu dalam kondisi yang baik sehingga akan memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap para peziarah.

Oleh karena itu perlunya dilakukan identifikasi kebutuhan pemeliharaan secara cermat sehingga kecukupan anggaran akan terjamin.

Dari uraian tersebut maka diambil kebijakan sebagai berikut :

1. Penetapan target kinerja memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.
2. Anggaran kinerja disusun berdasarkan skala prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama perangkat daerah dan pencapaian misi daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial terhadap capaian kinerja pelayanan dinas berdasarkan indikator tujuan, sasaran, IKU, IKK dan SPM disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Blitar

No	Indikator	IKU/ IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	Urusan Sosial													
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%*	100%	100%	Pemenuhan kebutuhan dasar dalam hal ini diintervensi melalui layanan rehabilitasi sosial dasar. Terhadap keseluruhan populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lansia terlantar dan gepeng di luar panti telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar setiap tahunnya sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil assessment yang dilakukan Dinas Sosial, meliputi layanan data dan pengaduan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas, fasilitasi
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%*	100%	100%	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%*	100%	100%	

No	Indikator	IKU/ IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
4	Persentase gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%*	100%	100%	pembuatan dokumen administrasi kependudukan, fasilitasi akses layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar, layanan penelusuran keluarga, reunifikasi keluarga serta layanan rujukan
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	SPM IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%*	100%	100%	Pelayanan terhadap korban bencana berdasarkan kejadian bencana baik bencana alam maupun bencana sosial. Terhadap korban bencana Pemkot Blitar melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan paket bahan makanan pokok yang anggarannya bersifat penyediaan/penjagaan dan untuk kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dalam skala yang lebih lengkap dialokasikan anggaran melalui BTT pada BPKAD, sehingga dari keseluruhan korban bencana akan terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai indikator pembentuknya.
6		IKU	-	-	2,32%	2,77%	3,24%	-	-	2,70%	3,00%*	3,24%	-	

No	Indikator	IKU/ IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	Persentase fakir miskin yang berdaya													Fakir miskin yang berdaya menggambarkan kondisi meningkatnya kemampuan ekonomi keluarga miskin yang dilakukan melalui upaya pemberdayaan sosial baik melalui pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan usaha serta pendampingan penerima manfaat sehingga tergraduasi mandiri dari penerima bantuan sosial. Target tahun 2024 telah tercapai dan pada tahun 2025 dan 2026 diharapkan capaian terus meningkat.
7	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	IKU	1,45 %	1,47%	1,49%	1,52%	1,54%	6,09%	1,46%	6,44%	1,52%*	1,54%	-	Data PPKS sifatnya fluktuatif mengingat PPKS mempunyai mobilitas sosial yang sangat tinggi dan keberadaannya sangat mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan yang mendadak seperti bencana alam, konflik sosial maupun bencana non alam sehingga jumlahnya bisa naik/turun setiap tahunnya. Namun dari data yang tersaji sejak tahun 2022 terjadi tren penurunan jumlah PPKS. Sinergitas penyelenggaraan

No	Indikator	IKU/ IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
														kesejahteraan sosial yang dilakukan antara pemerintah pusat, daerah dan seluruh stake holder serta dukungan keluarga masyarakat merupakan kunci untuk mengatasi permasalahan PPKS.

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa berdasarkan target Renstra tahun 2021-2026 dari semua indikator kinerja SPM, IKK dan IKU secara keseluruhan dikategorikan memenuhi target dengan analisa sebagai berikut :

3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci

a. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti

Target indikator ini ditetapkan sebesar 100% pada setiap tahunnya dan sejak tahun 2022-2024 tercapai 100%. Sedangkan proyeksi capaian tahun 2025 juga 100% sehingga capaian setiap tahunnya telah memenuhi target.

Faktor pendukung keberhasilan kinerja ini antara lain ketepatan dalam melakukan asesment terhadap penerima layanan sehingga layanan diberikan sesuai kebutuhan masing-masing yang bersifat spesifik, terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi pemerintah dan stake holder terkait dalam pemberian layanan rahabilitasi sosial dasar serta dukungan keluarga/lingkungan.

Ketepatan pemberian layanan dan kolaborasi program/kegiatan akan berimplikasi terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar akan layanan rehabilitasi sosial dasar sehingga yang bersangkutan akan berkembang fungsi sosialnya.

Kedepan kualitas layanan perlu terus ditingkatkan baik melalui peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial, peningkatan kerja sama antar instansi dan stake holder terkait, serta mendorong kepedulian keluarga/lingkungan dalam melaksanakan pengasuhan keluarga.

b. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti

Berdasarkan tabel diatas, target indikator kinerja ini ditetapkan 100% pada tahun 2022-2026 dengan realisasi tahun 2022-2024 sebesar 100% dan proyeksi capaian tahun 2025 juga 100% atau telah memenuhi target.

Faktor pendukung keberhasilan kinerja ini antara lain ketepatan dalam melakukan asesment terhadap penerima layanan sehingga layanan diberikan sesuai kebutuhan masing-masing yang bersifat spesifik, terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi pemerintah dan stake holder terkait dalam pemberian layanan rahabilitasi sosial dasar serta dukungan keluarga/lingkungan.

Ketepatan pemberian layanan dan kolaborasi program/kegiatan akan berimplikasi terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar akan layanan rehabilitasi sosial dasar sehingga yang bersangkutan akan berkembang fungsi sosialnya.

Kedepan kualitas layanan perlu terus ditingkatkan baik melalui peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial, peningkatan kerja sama antar instansi dan stake holder terkait, serta mendorong kepedulian keluarga/lingkungan dalam melaksanakan pengasuhan keluarga.

c. Persentase Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti

Sejak tahun 2022-2024 capaian kinerja ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100% setiap tahunnya. Demikian pula proyeksi capaian tahun 2025 juga sebesar 100%.

Faktor pendukung keberhasilan kinerja ini antara lain ketepatan dalam melakukan asesment terhadap penerima layanan sehingga layanan diberikan sesuai kebutuhan masing-masing yang bersifat spesifik, terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi pemerintah dan stake holder terkait dalam pemberian layanan rahabilitasi sosial dasar serta dukungan keluarga/lingkungan.

Ketepatan pemberian layanan dan kolaborasi program/kegiatan akan berimplikasi terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar Lansia terlantar akan layanan rehabilitasi sosial dasar sehingga yang bersangkutan akan berkembang fungsi sosialnya.

Kedepan kualitas layanan perlu terus ditingkatkan baik melalui peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial, peningkatan kerja sama antar instansi dan stake holder terkait, serta mendorong kepedulian keluarga/lingkungan dalam melaksanakan pengasuhan keluarga.

d. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti tercapai 100% sejak 2022-2024, dan proyeksi capaian di tahun 2025 sebesar 100% sehingga dikategorikan telah memenuhi target.

Faktor pendukung keberhasilan kinerja ini antara lain ketepatan dalam melakukan asesment terhadap penerima layanan sehingga layanan diberikan sesuai kebutuhan masing-masing yang bersifat spesifik, terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi pemerintah dan stake holder terkait dalam pemberian layanan rahabilitasi sosial dasar serta dukungan keluarga/lingkungan.

Ketepatan pemberian layanan dan kolaborasi program/kegiatan akan berimplikasi terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar Gepeng akan layanan rehabilitasi sosial dasar sehingga yang bersangkutan akan berkembang fungsi sosialnya.

Kedepan kualitas layanan perlu terus ditingkatkan baik melalui peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial, peningkatan kerja sama antar instansi dan stake holder terkait, serta mendorong kepedulian keluarga/lingkungan dalam melaksanakan pengasuhan keluarga.

e. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota

Pada dokumen Renstra tahun 2021-2026 target kinerja ini ditetapkan sebesar 100% setiap tahunnya dan capaian setiap tahunnya sudah memenuhi target yaitu 100% sejak tahun 2022-2024. Proyeksi capaian di tahun 2025 juga sebesar 100%.

Keberhasilan capaian kinerja ini berkat dukungan pemerintah utamanya dukungan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana baik yang teranggarkan melalui Dinas Sosial maupun melalui BPKAD pada pos anggaran BTT.

Dukungan Dinas Sosial bagi korban bencana yang berkaitan dengan pemenuhan SPM meliputi penyediaan makanan, penanganan khusus kepada kelompok rentan sampai dengan layanan dukungan psikososial. Implikasi dari

kegiatan ini adalah terpenuhinya dasar korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Kedepan komitmen dan dukungan pemerintah terhadap perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial perlu dilanjutkan terus menerus mengingat kejadian dan resiko bencana datangnya sewaktu-waktu.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

a. Persentase Fakir Miskin yang Berdaya

Sejak tahun 2024 indikator ini dihitung dengan formulasi baru berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 yang dituangkan dalam perubahan Renstra tahun 2021-2026. Dari target 2,32% di tahun 2024 tercapai 2,70% sehingga telah memenuhi target. Proyeksi realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 3,00% dari target 2,77%.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah adanya bantuan peralatan usaha/pengembangan ekonomi yang didukung pendampingan dan motivasi usaha serta tekad dan semangat penerima manfaat untuk hidup lebih baik sehingga berani untuk graduasi mandiri.

Implikasi yang ditimbulkan antara lain meningkatnya pendapatan keluarga yang selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

Kedepan upaya peningkatan ekonomi masyarakat perlu dilakukan secara kolaboratif antar instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah utamanya untuk pendampingan yang berkelanjutan dan fasilitasi akses pemasaran.

b. Persentase Penurunan PPKS

Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah PPKS tahun berjalan dengan jumlah PPKS tahun sebelumnya.

Capaian kinerja ini bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, namun secara keseluruhan telah memenuhi target kinerja setiap tahunnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang efektif dan kolaboratif sangat mendukung tercapainya kinerja ini, juga komitmen pemerintah dan dukungan anggaran yang mencukupi.

Implikasi yang timbul dari keberhasilan ini adalah terpenuhinya PPKS akan layanan dasar bidang sosial sehingga meningkat fungsi sosialnya dan dapat hidup layak di masyarakat.

Keberadaan PPKS dengan segala permasalahannya merupakan suatu keniscayaan sehingga kedepan perlu dikembangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan cakupan yang lebih luas.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diupayakan untuk mengembangkan fungsi sosial PPKS sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungannya secara wajar. Karakteristik PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang sangat dinamis, sering berpindah-pindah sehingga jumlahnya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah habis. Keberadaan PPKS dengan segala permasalahannya di Kota Blitar tahun 2024 masih tergolong tinggi

yaitu sebanyak 10.817 jiwa atau 6,71% dari jumlah penduduk, meskipun angka ini sudah menurun 6,44% dari tahun 2023. Angka ini masih didominasi oleh kelompok fakir miskin yang mencapai 9.860 jiwa atau 91,15% dari jumlah PPKS. Disamping fakir miskin, jenis PPKS lainnya yang tergolong menonjol sebarannya di Kota Blitar terdiri dari penyandang disabilitas, Lansia terlantar, PPKS kluster anak dan Gepeng. Pada tahun 2024 jumlah penyandang disabilitas tercatat sebanyak 577, Lansia terlantar 135, PPKS cluster anak 141 dan Gepeng 22 orang, pemulung 17 dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 21 orang.

Permasalahan yang dihadapi PPKS sangat beragam antara lain meliputi kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, keterpencilan, ketunaan sosial, eksploitasi, diskriminasi. Oleh karena itu penanganan PPKS yang efektif membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan mempertimbangkan berbagai aspek permasalahan yang dihadapi oleh setiap kelompok PPKS. Penanganan PPKS melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial perlu dilakukan secara berkelanjutan mengingat masalah PPKS pasti semakin berkembang seiring dengan perkembangan peradaban jaman. Meskipun capaian kinerja terhadap target Renstra tahun 2021-2026 sudah tercapai namun kualitas layanan perlu terus ditingkatkan sehingga tujuan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum akan terwujud.

Upaya penanganan kemiskinan melalui pemberian Bantuan Sosial merupakan strategi untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Namun hal ini belum didukung oleh ketersediaan data yang memadai sehingga diperlukan penyediaan data tunggal yang akurat dan termutakhirkan untuk memudahkan penyelarasan program antar instansi pemerintah agar tepat sasaran. Sedangkan upaya pemberdayaan fakir miskin dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan pemberian Bansos sarana usaha sehingga selesai pelatihan diharapkan bisa langsung membuka rintisan usaha sebagai sumber tambahan penghasilan.

Rehabilitasi sosial bagi PPKS dengan gangguan keterlantaran, kecacatan, dan ketunasosialan memerlukan peningkatan kualitas pemberi layanan terutama PSKS sebagai ujung tombak pelayanan sosial di masyarakat agar bisa beradaptasi dengan perkembangan masalah sosial. Disamping peran serta PSKS, kepedulian keluarga, lingkungan/masyarakat sekitar PPKS akan sangat membantu dan meningkatkan efektivitas penanganan PPKS baik berupa pendampingan, bimbingan maupun motivasi agar PPKS bisa menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di lingkungannya.

Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan sosial bagi PPKS yang memerlukan layanan lanjutan. Kondisi ini belum didukung adanya tempat penampungan sementara yang representatif bagi PPKS yang mengalami permasalahan sosial akut ketika menunggu antrian dirujuk ke unit rehabilitasi sosial milik provinsi/kementerian. Pengelolaan shelter PPKS kurang optimal karena keterbatasan SDM. Sedangkan di Kota Blitar hanya ada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak yang tentunya pelayanannya terbatas hanya untuk anak, belum mengakomodir PPKS selain cluster anak. Dari uraian permasalahan tersebut maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih cukup tinggi dan bersifat fluktuatif;
2. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan peran serta keluarga/masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Belum tersedianya data yang akurat sebagai dasar pengembangan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar pelayanan PPKS makin efektif dan tepat sasaran;
4. Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD Kota Blitar tahun 2026 disebutkan bahwa tema pembangunan tahun 2026 yaitu Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Pelayanan Dasar yang Didukung Kualitas SDM dan Infrastruktur yang Berkelanjutan sedangkan prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2026 adalah :

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan inklusif
2. Revitalisasi infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public
4. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Adapun prioritas pembangunan yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan. Oleh karena itu dalam penyusunan Renja Dinas Sosial tahun 2026 dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD sehingga diperoleh konsistensi substansi Renja Dinas Sosial dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD. Renja Dinas Sosial disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program, kegiatan dan sub yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Sosial Kota Blitar disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100% %	4.737.256.349	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100% %	4.737.256.149	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	62.996.670	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	64.966.500	
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	3.093.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	3.093.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Lap	53.123.670	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Lap	53.123.500	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah data statistic sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	23 Data	1.000.000	Mendukung program satu data
1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	3.750.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	3.750.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	11 Dokumen	3.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	11 Dokumen	3.000.000	
1.5						Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	1.000.000	Untuk menjamin keselarasan dengan tujuan pembangunan pusat dan daerah
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.602.328.493	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.602.328.193	
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org/ bln	3.599.740.193	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org/ bln	3.599.740.193	
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/		Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan	12 Lap	2.588.300	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/		Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	12 Lap	2.588.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Triwulanan/ Semesteran SKPD		Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD			Triwulanan/ Semesteran SKPD		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD			
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100 %	2.500.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100 %	2.500.000	
3.1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	2.500.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	2.500.000	
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	89.523.650	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	94.611.925	
4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	24.200.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	32.193.200	Tambahan anggaran untuk pengadaan sepatu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	65.323.650	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	62.418.725	Menyesuaikan dengan kebutuhan
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	174.045.645	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	175.833.479	
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Paket	9.900.700	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Paket	9.983.900	
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	13.294.200	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	13.298.900	
5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	18.908.750	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	17.326.600	Menyesuaikan dengan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	30.713.600	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	28.855.200	Menyesuaikan dengan kebutuhan
5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	16.246.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	16.245.600	
5.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	5.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	5.400.000	
5.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Lap	76.492.395	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Lap	81.630.079	Menyesuaikan dengan kebutuhan
5.8	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2400 Dok	3.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2400 Dok	2.985.200	Menyesuaikan dengan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	12.205.500	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	20.405.700	
6.1						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	3 Unit	7.956.000	Pengadaan rak arsip
6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	12.205.500	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	12.449.700	Menyesuaikan dengan standar harga
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	638.583.191	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	621.590.852	
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	87.486.324	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	89.509.200	Menyesuaikan dengan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Lap	551.096.867	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Lap	532.081.652	Menyesuaikan dengan kebutuhan
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	155.002.200	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	155.019.500	
8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	25.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	24.984.300	Menyesuaikan dengan standar harga
8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	69.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	68.998.400	Menyesuaikan dengan standar harga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	50 Unit	28.165.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	50 Unit	28.108.800	Menyesuaikan dengan standar harga
8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	32.837.200	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	32.928.000	Menyesuaikan dengan standar harga
II	Program Pemberdayaan sosial		Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	100 %	666.331.589	Program Pemberdayaan sosial		Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	100 %	666.323.400	
1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga di Bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	100 %	666.331.589	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga di Bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	100 %	660.323.400	Menyesuaikan dengan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	100 %				Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	100 %		
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembg	242.948.689	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembg	235.015.500	Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan		Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	2 Org	6.640.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan		Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	2 Org	6.640.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Sub Kegiatan Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial		Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	500 Orang	144.296.600	Sub Kegiatan Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial		Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	500 Orang	144.296.600	
1.4	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	47 Orang	272.446.300	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	47 Orang	274.371.300	Menyesuaikan dengan kebutuhan
III	Program Rehabilitasi sosial		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100 %	888.071.000	Program Rehabilitasi sosial		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100 %	888.070.200	
			Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100 %				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100 %				Persentase Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100 %		
			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100 %				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100 %		
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	14,63 %				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	14,63 %		
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan	544 Orang	858.071.000	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan rehabilitasi sosial dasar	544 Org	867.148.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Luar Panti Sosial		rehabilitasi sosial dasar								
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	145 Org	377.335.400	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	145 Org	402.406.600	Tambahan permakanan untuk klien di shelter
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Org	15.275.700	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Org	16.237.800	Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	43.173.800	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	44.880.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	337 Org	175.833.600	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	337 Org	149.456.100	Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.5	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gepeng dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	27.284.200	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gepeng dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	37.184.200	Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.6	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	39.306.300	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	39.306.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	32.074.900	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	31.910.800	Menyesuaikan dengan standar harga
1.8	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	6.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	5.800.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.9	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Org	28.312.100	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Org	35.453.600	Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.9	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	3.745.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	2.400.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)		Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5.000.000	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)		Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5.000.000	
1.8	Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	59.978.600	Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.9	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial		Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	110 Orang	55.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial		Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	110 Orang	37.405.200	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan		Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan rehabilitasi sosial	6 Orang	30.000.000	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan rehabilitasi sosial	6 Orang	20.291.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NAPZA di Luar Panti Sosial										
2.1	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	5.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	1.200.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2.2	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	5.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	4.965.000	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	20.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	14.756.300	Menyesuaikan dengan kebutuhan
IV	Program Perlindungan dan jaminan sosial		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 %	12.144.510.271	Program Perlindungan dan jaminan sosial		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 %	15.028.950.271	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	30 %				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	30 %		
			Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	0,79 %				Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	0,79 %		
1	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima Bansos	100 %	12.144.510.271	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima Bansos	100 %	15.028.950.271	
			Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkatkan keterampilannya	20 %				Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkatkan keterampilannya	20 %		
			Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	100 %				Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	100 %		
1.1	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	7774 Orang	79.990.000	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	7774 Orang	79.990.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orng	479.949.549	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	479.849.549	
1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7774 Orang	11.584.660.722	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7774 Orang	14.469.100.722	Menyesuaikan dengan kebutuhan (tambahan KPM Rastrada)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin		Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	10.000	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin		Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	10.000	
V	Program Penanganan Bencana		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100 %	205.615.870	Program Penanganan Bencana		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100 %	205.615.870	
1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100 %	52.573.770	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100 %	52.573.770	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orng	34.573.770	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orng	34.573.770	
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orng	9.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orng	9.000.000	
1.3	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orng	9.000.000	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orng	9.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase masyarakat yang meningkat kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana	0,14 %	153.042.100	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase masyarakat yang meningkat kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana	0,14 %	153.042.100	
			Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	100 %				Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	100 %		
2.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orng	139.231.900	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	139.231.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana		Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	27 Orng	4.923.800	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana		Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	27 Orang	4.923.800	
2.3	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah		Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	225 Orang	8.886.400	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah		Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	225 Orang	8.886.400	
VI	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase TMP Nasional yang dikelola dengan baik	100 %	35.000.000	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase TMP Nasional yang dikelola dengan baik	100 %	35.000.000	
1	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase TMP yang terpelihara	100 %	35.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase TMP yang terpelihara	100 %	35.000.000	
1.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	987 Makam	35.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	987 Makam	35.000.000	

Dari tabel diatas terdapat beberapa perbedaan anggaran dan target kinerja sub kegiatan antara Rancangan Awal RKPD dengan Penetapan RKPD karena menyesuaikan dengan analisis kebutuhan dalam rangka pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan kegiatan yang berasal aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Dinas Sosial Kota Blitar berupaya untuk menampung aspirasi masyarakat salah satunya melalui pelaksanaan Musrenbang, pokok-pokok pikiran legislatif dan usulan hibah dari Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun Organisasi Sosial. Selanjutnya semua usulan ditelaah dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial untuk ditetapkan apakah usulan tersebut diakomodir atau tidak. Rekapitulasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Blitar

Nama PD : Dinas Sosial

NO	USULAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
I	MUSRENBANG					
A	KEC. SUKOREJO					
	NIHIL					
B	KEC. KEPANJENKIDUL					
1.	Pembinaan/sosialisasi/Bimtek PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dan Organisasi Sosial	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Ngadirejo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau	60 Orang	Diakomodir, kegiatan digabung untuk PSKS se Kota Blitar

NO	USULAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
		Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya		
2.	Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas/sakit (kursi roda)	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Kel. Kepanjenkidul, Kel. Bendo, Kel. Kauman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	Diakomodir
3.	Peningkatan Kapasitas Karang Werdha	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelurahan se Kecamatan Kepanjenkidul	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Lembaga	Tidak diakomodir, kewenangan kelurahan

NO	USULAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
C	KEC. SANANWETAN					
	NIHIL					
II	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD					
	NIHIL					
II	Usulan Hibah					
1.	PWRI Kota Blitar	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jl. Anjasmoro 83 Kota Blitar	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Tahun	Diakomodir
2.	Yayasan Kasih Harmoni	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jl. Cemara Selatan 66 Kota Blitar	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Tahun	Diakomodir

NO	USULAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
		Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota		
3.	Yayasan Rukun Ginawa Sentosa	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jl. Ir. Soekarno 372B Kota Blitar	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Tahun	Diakomodir
4.	Pepabri Kab/Kota Blitar	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jl. Kombes Pol Duriat 08 Kota Blitar	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Tahun	Diakomodir

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan nasional tahun 2026 adalah “kedaulatan pangan dan energy, serta ekonomi yang produktif dan inklusif”. Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan, energi dan air. Sedangkan prioritas pembangunan nasional dan arah kebijakan tahun 2026 adalah :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan Sumber daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas pembangunan nasional yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah prioritas keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dengan arah kebijakan :

1. Pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan
2. Peningkatan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
3. Pembangunan kemandirian pedesaan dari bawah
4. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Dalam rangka pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dilaksanakan melalui :

1. Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi
2. Perlindungan sosial adaptif dan inklusif
3. Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif

Dalam rangka mewujudkan program prioritas nasional dimaksud Dinas Sosial mendukung terwujudnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional melalui fasilitasi ground cek data yang dilakukan oleh Pendamping PKH, pemutakhiran dan pengusulan untuk updating DTSEN sebagai dasar pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial yang terintegrasi antar lembaga pemerintah baik program bantuan, jaminan dan layanan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan ekonomi dengan fokus sasaran penduduk miskin dan rentan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah, Dinas Sosial sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menetapkan tujuan dan sasaran Renja yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota. Dinas Sosial mengemban misi kedua RPJMD tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan Kota Blitar Sehat, Sejahtera dan Bahagia pada sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup dan Ketangguhan Sosial Masyarakat. Berdasarkan misi dan sasaran RPJMD tersebut Dinas Sosial menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029. Adapun tujuan, sasaran serta indikator dan target kinerja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026-2027

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Realisasi		Target		Ket
					2024	2025	2026	2027	
I	Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKeSos)	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan berbagai aspek kehidupan sosial. IKS dibangun dari aspek-aspek kesejahteraan sosial yang mencakup dimensi-dimensi utama seperti: Ketahanan Keluarga, Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Sosial, Partisipasi Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Layak, Perlindungan Sosial, Pekerjaan dan Pendapatan, dan Lingkungan Sosial. Setiap dimensi diukur menggunakan beberapa indikator, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dan dinilai dengan menggunakan skala tertentu.	Hasil perhitungan Kementerian Sosial $\text{IKeSos} = \text{dimensi kebutuhan dasar} \times 0,27 + \text{dimensi peranan sosial} \times 0,31 + \text{dimensi keberdayaan ekonomi} \times 0,42$	62,23*	62,58*	62,93	63,28	-
2	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini Dinas Sosial yang hasil pengukurannya didapat melalui kegiatan survey kepuasan masyarakat melalui aplikasi SuKMa-e Jatim/media lain	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Dinas Sosial Kota Blitar berdasarkan hasil suvey melalui aplikasi SuKMa-e Jatim/media lain pada tahun berjalan	88,9	89*	89,2	89,4	-
3	Sasaran 2 : Meningkatnya Fungsi Sosial PPKS	Persentase PPKS yang meningkat kemampuan fungsi sosialnya	PPKS yang meningkat kemampuan fungsi sosialnya adalah PPKS penerima layanan yang mampu mengurus diri sendiri/bersosialisasi dengan lingkungan/meningkat potensi diri/meningkat kemampuan beraktivitas fisik/meningkat kemampuan ekonominya	Jumlah PPKS penerima layanan yang meningkat fungsi sosialnya $\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$	89,71%	90,21%*	90,81%	91,50%	IKU

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditetapkan, maka disusun strategi yang mencerminkan pendekatan menyeluruh untuk mencapai tujuan strategis organisasi, dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta responsivitas terhadap dinamika lingkungan strategis. Strategi ini dirumuskan berdasarkan analisis internal dan eksternal, termasuk hasil evaluasi Renja periode sebelumnya, capaian kinerja, serta tantangan yang dihadapi ke depan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan penjabaran dalam bentuk kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Perumusan strategi dalam Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan penting untuk menjembatani antara visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah dengan program dan kegiatan yang operasional. Dalam perumusannya, strategi disusun secara bertahap dan terukur, sehingga mampu memberikan arah yang jelas bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub-kegiatan selama periode perencanaan. Adapun strategi dan arah kebijakan Renja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2026 disampaikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Kota Blitar Yang Maju, Sehat Dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan

Misi : Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif	Meningkatnya fungsi sosial PPKS	Perluasan akses dan pemerataan layanan kesejahteraan sosial	Peningkatan upaya rehabilitasi sosial PPKS bukan korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHA di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial
			Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan	Progran Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, sosial dan/atau non sosial daerah kab/kota	Program Penanganan Bencana
			Sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana pada anak usia sekolah dan masyarakat di daerah rawan bencana	
		Penguatan basis data penerima program kesejahteraan sosial	Pendataan dan pemutakhiran data keluarga miskin dan rentan secara berkala	Progran Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Mendorong kemitraan dengan instansi/stake holder terkait dalam rangka layanan rehabilitasi sosial lanjutan	Program Rehabilitasi Sosial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial baik kelembagaan maupun perseorangan	Peningkatan kompetensi SDM PSKS baik kelembagaan maupun perseorangan	Program Pemberdayaan Sosial
			Peningkatan kompetensi Tagana dalam penanganan bencana	Program Penanganan Bencana
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan nasional	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
		Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan bagi warga miskin	Peningkatan keterampilan dan pemberian bantuan peralatan usaha bagi masyarakat miskin dan rentan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	- Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah - Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku - Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun Indikator Kinerja Kunci Kabupaten/kota urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target		Ket
					2024	2025	2026	2027	
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti adalah penyandang disabilitas terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesment Dinas Sosial Penyandang disabilitas terlantar adalah penyandang disabilitas yang : a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus b. Masih ada perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya _____ x 100% populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/ kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100	100*	100	100	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti adalah anak terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesment Dinas Sosial Anak Terlantar adalah anak yang a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus b. Masih ada perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya _____ x 100% Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100	100*	100	100	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target		Ket
					2024	2025	2026	2027	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti adalah Lanjut Usia terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesment Dinas Sosial Lanjut Usia terlantar adalah lanjut usia yang : a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus b. Masih ada perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya _____ x 100% Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100	100*	100	100	
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Penyandang Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti adalah gelandangan dan pengemis yang mendapat layanan rehabilitasi sosial sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesment Dinas Sosial Kriteria Gepeng : a. Perseorangan atau kepala keluarga usia 19 tahun sampai dengan 60 tahun b. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus c. Tidak memiliki tempat tinggal tetap d. Masih ada perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang peduli	Jumlah gelandangan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya _____ x 100% Populasi gelandangan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100	100*	100	100	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target		Ket
					2024	2025	2026	2027	
5	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti sesuai standar adalah PSKS yang melakukan pelayanan sosial bagi PPKS di luar panti sesuai SOP Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan atau relawan sosial meliputi pekerja sosial fungsional/penyuluh sosial fungsional, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar $\frac{\text{Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti}}{\text{Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti}} \times 100\%$	%	100	100*	100	100	
6	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana sesuai kewenangan Dinas Sosial meliputi permakanaan, kebutuhan pakaian dan kelengkapan lainnya, penanganan khusus bagi kelompok rentan korban bencana, dukungan psikososial dan tempat pengungsian sesuai standar Korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah korban bencana alam, sosial dan non alam skala kab/kota yang mendapatkan layanan sosial sesuai kebutuhan (berdasarkan hasil asesment Dinas Sosial)	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/ kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya $\frac{\text{Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/ kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota}} \times 100\%$	%	100	100*	100	100	
7	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar adalah yang melaksanakan layanan perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai SOP Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial dalam hal ini adalah Tagana	Jumlah pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar $\frac{\text{Jumlah pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana}}{\text{Jumlah pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana}} \times 100\%$	%	100	100*	100	100	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target		Ket
					2024	2025	2026	2027	
8	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti adalah PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat layanan rehabilitasi sosial sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesment Dinas Sosial PPKS lainnya adalah PPKS sesuai Permensos 8/2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan PMKS dan PSKS, diluar ODHA, korban penyalahgunaan Napza, fakir miskin, korban bencana alam dan korban bencana sosial, penyandang disabilitas terlantar, Lansia terlantar, Gepeng dan PPKS cluster anak	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya _____ x 100% Populasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	0	4,88*	14,63	14,63	
9	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar adalah yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai SOP Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial perorangan meliputi TKSK, PSM, Pendamping PKH, Karang Taruna	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar _____ x 100% Populasi potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan	%	100	100*	100	100	
10	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar adalah keluarga yang menerima pemenuhan kebutuhan dasar yang diintervensi dalam bentuk pemberian Bantuan Sosial yang difasilitasi Dinas Sosial (termasuk PKH dan BPNT)	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar _____ x 100% Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	%	100	100*	100	100	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target		Ket
					2024	2025	2026	2027	
11	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Penerima Manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi adalah peserta pelatihan keterampilan dan/atau penerima bantuan pengembangan ekonomi yang memiliki rintisan usaha mandiri Populasi fakir miskin serta masyarakat miskin dan rentan cakupan daerah kabupaten/kota yang mendapatkan pemberdayaan sosial ekonomi adalah populasi peserta pelatihan keterampilan dan/atau penerima bantuan pengembangan ekonomi pada tahun n	Jumlah penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi $\frac{\text{Jumlah penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi}}{\text{Populasi fakir miskin serta masyarakat miskin dan rentan cakupan daerah kabupaten/kota yang mendapatkan pemberdayaan sosial ekonomi}} \times 100\%$	%	13,25	14,5*	30	32,5	
12	Jumlah pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Pendataan fakir miskin dan kelompok rentan meliputi pendataan baru dan/atau pemutakhiran data warga miskin yang diaplikasikan melalui sistem elektronik dengan hasil berupa penetapan peringkat kesejahteraan keluarga yang merupakan urutan tingkat kesejahteraan keluarga yang terdiri dari kelompok desil 1 (satu) sampai dengan kelompok desil 10 (sepuluh)	Jumlah pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun. Pemutakhiran dilakukan minimal setiap bulan sesuai SK pengesahan oleh pejabat berwenang daerah kabupaten/kota 1 kali setiap bulan. walaupun update di aplikasi bisa dilakukan setiap hari. Pengesahan oleh daerah menjadi dasar dalam penetapan SK DTKS yang diterbitkan setiap bulan	%	100	100	100	100	
13	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	Sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar meliputi mobil Dapur Umum Lapangan berserta perlengkapannya, kendaraan operasional roda 2 dan roda 4, tenda dapur umum dan alat komunikasi (HT) dalam kondisi baik serta layak dioperasikan untuk layanan korban bencana	Jumlah sarana prasarana bagi korban bencana yang sesuai standar $\frac{\text{Jumlah sarana prasarana bagi korban bencana}}{\text{Jumlah sarana prasarana bagi korban bencana}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target		Ket
					2024	2025	2026	2027	
14	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	Sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti meliputi shelter beserta sarana prasarana, kendaraan operasional TRC roda 2 dan roda 4 dalam kondisi baik serta layak dioperasikan untuk layanan sosial di luar panti	Jumlah sarana prasarana yang disediakan untuk pelayanan sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sesuai standar _____ x 100% Jumlah sarana prasarana untuk pelayanan sosial di luar panti yang disediakan	%	100	100	100	100	

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial maka diperlukan rencana yang jelas terstruktur yang dituangkan dalam 6 program, 15 kegiatan dan 56 sub kegiatan dengan total kebutuhan anggaran Rp. 21.555.215.890. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial tahun 2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
1.06.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.01.0009	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.01.0010	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.01.0013	Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1.06.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	
1.06.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
1.06.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1.06.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	
1.06.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
1.06.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1.06.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.02	Program Pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau relawan sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti sesuai standar	
1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	
		Persentase Lembaga di Bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	
1.06.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi dan IKK
1.06.02.2.03.0010	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.02.2.03.0011	Sub Kegiatan Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.02.2.03.0014	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Mendukung pencapaian Tupoksi dan IKK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1.06.04	Program Rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan rehabilitasi sosial dasar	
1.06.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan, SPM dan IKK
1.06.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan, SPM dan IKK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1.06.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan, SPM dan IKK
1.06.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM dan IKK
1.06.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM dan IKK
1.06.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM dan IKK
1.06.04.2.01.0009	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM dan IKK
1.06.04.2.01.0010	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM dan IKK
1.06.04.2.01.0012	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM dan IKK
1.06.04.2.01.0014	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM dan IKK
1.06.04.2.01.0016	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM dan IKK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1.06.04.2.01.0017	Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan, SPM dan IKK
1.06.04.2.01.0018	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan, SPM dan IKK
1.06.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan rehabilitasi sosial	
1.06.04.2.02.0001	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi dan IKK
1.06.04.2.02.0013	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi dan IKK
1.06.04.2.02.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi dan IKK
1.06.05	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	
		Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima Bansos	
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkatkan keterampilannya	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
		Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	
1.06.05.2.02.0001	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan dan IKK
1.06.05.2.02.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan dan IKK
1.06.05.2.02.0006	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan dan IKK
1.06.05.2.02.0009	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan dan IKK
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
1.06.06.2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	
1.06.06.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM dan IKK
1.06.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM dan IKK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1.06.06.2.01.0004	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM dan IKK
1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang meningkat kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana	
		Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	
1.06.06.2.02.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi dan IKK
1.06.06.2.02.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.06.2.02.0008	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Mendukung pencapaian Tupoksi dan IKK
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP Nasional yang terkelola dengan baik	
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	
1.06.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial bertolak pada pencapaian visi dan misi Kota Blitar yang ingin dicapai yang dijabarkan dan RPJMD Kota Blitar tahun 2025 – 2029 dan Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029 yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang ingin dicapai. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Sosial menyusun dokumen Rencana Kerja tahun 2026 yang menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, lokasi dan pendanaan indikatif dengan berpedoman pada Renstra tahun 2025-2029 dan RKPD Kota Blitar 2026. Hasil analisis capaian kinerja tahun sebelumnya dengan memperhatikan rencana tindak lanjut LKjIP tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2024
Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kemampuan fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya	Meningkatkan keterampilan fakir miskin melalui pelatihan keterampilan dan Bansos peralatan usaha	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
2.	Meningkatkan perlindungan sosial bagi warga miskin melalui bantuan sosial	Menetapkan kriteria yang jelas dan spesifik terkait penerima bantuan sosial	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
3	Mengembangkan fungsi sosial PPKS/PMKS	Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS/PPKS agar meningkat fungsi sosialnya sehingga bisa hidup wajar di masyarakat	- Program Rehabilitasi Sosial - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang - Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
			- Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Datan dan Pengaduan - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) - Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan - Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan - Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	Menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial cakupan kab/kota	- Program Penanganan bencana - Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang - Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan - Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana - Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
			- Sub Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah - Sub Kegiatan Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana
5	Meningkatkan daya dukung PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatkan kapasitas PSKS dalam layanan kesejahteraan sosial	- Program Pemberdayaan Sosial - Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan - Sub Kegiatan Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Adapun rencana kerja, pendanaan tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Blitar

OPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Sosial		Kota Blitar		21.555.215.890				18.206.717.730
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				21.555.215.890				18.206.717.730
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				21.555.215.890				18.206.717.730
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku		100 %	4.737.256.149			100 %	4.835.416.170
1 06 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	64.966.500			100%	64.966.670
1 06 01 2.01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dok	3.093.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dok	3.093.000
1 06 01 2.01 0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25 Laporan	53.123.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 Laporan	53.123.670
1 06 01 2.01 0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		23 Data	1.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		23 Data	1.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 06 01 2.01 0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	3.750.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Berita Acara	3.750.000
1 06 01 2.01 0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		11 Dok	3.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11 Dok	3.000.000
1 06 01 2.01 0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		1 Berita Acara	1.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Berita Acara	1.000.000
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	3.602.328.193			100%	3.647.012.534
1 06 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 Org/bl	3.599.740.193	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		27 Org/bl	3.644.165.404
1 06 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		12 Laporan	2.588.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	2.847.130

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 06 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar		100 %	2.500.000			100%	2.500.000
1 06 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		10 Laporan	2.500.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Laporan	2.500.000
1 06 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	94.611.925			100%	89.523.650
1 06 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	32.193.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	24.200.000
1 06 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		26 Orang	62.418.725	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		27 Orang	65.323.650
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	175.833.479			100%	187.045.645
1 06 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	9.983.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	9.990.700
1 06 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 Paket	13.298.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	13.294.200
1 06 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	17.326.600	DANA ALOKASI		1 Paket	18.908.750

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						UMUM (DAU)			
1 06 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10 Paket	28.855.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Paket	28.713.600
1 06 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	16.245.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	16.246.000
1 06 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dok	5.508.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dok	5.400.000
1 06 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25 Laporan	81.630.079	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Laporan	91.492.395
1 06 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2040 Dok	2.985.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2040 Dok	3.000.000
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	20.405.700			100%	12.205.500
1 06 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit	7.956.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Unit	0
1 06 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	12.449.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	12.205.500

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	621.590.852			100%	677.159.971
1 06 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 Laporan	89.509.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		48 Laporan	87.486.324
1 06 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	532.081.652	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Laporan	589.673.647
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	155.019.500			100%	155.002.200
1 06 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		13 Unit	24.984.300	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Unit	25.000.000
1 06 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit	68.998.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	69.000.000
1 06 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	28.108.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Unit	28.165.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 06 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	32.928.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	32.837.200
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau relawan sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial		100 %	660.323.400			100 %	628.531.589
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga di Bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial		100 %	660.323.400			100%	628.531.589
		Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial		100 %				100 %	
1 06 02 2.03 0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		20 Lembaga	235.015.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Lembaga	237.948.689
1 06 02 2.03 0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial		2 Orang	6.640.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Orang	6.640.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 06 02 2.03 0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial		500 Orang	144.296.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		500 Orang	139.296.600
1 06 02 2.03 0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya		47 Orang	274.371.300	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		47 Orang	244.646.300
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti		100 %	888.070.200			100%	818.897.200
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti		100%				100%	
		Persentase Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti		100%				100%	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti		100%				100%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti		14.63 %				14,63%	
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan rehabilitasi sosial dasar		544 Orang	867.148.900			544Orang	788.897.200
1 06 04 2.01 0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		145 Orang	402.406.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		145 Orang	372.335.400
1 06 04 2.01 0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		52 Orang	16.237.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		52 Orang	15.275.700
1 06 04 2.01 0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		26 Orang	44.880.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Orang	20.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 06 04 2.01 0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-		4 Orang	3.500.000
1 06 04 2.01 0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		243 Orang	149.456.100	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		243 Orang	160.833.600
1 06 04 2.01 0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		276 Orang	37.184.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200 Orang	27.284.200
1 06 04 2.01 0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		35 Orang	39.036.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35 Orang	34.306.300
1 06 04 2.01 0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		50 Orang	31.910.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Orang	27.074.900
1 06 04 2.01 0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		25 Orang	5.800.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 Orang	6.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 06 04 2.01 0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-		5 Orang	1.000.000
1 06 04 2.01 0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		25 Orang	35.453.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 Orang	28.312.100
1 06 04 2.01 0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Orang	2.400.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Orang	3.475.000
1 06 04 2.01 0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Orang	5.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Orang	5.000.000
1 06 04 2.01 0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		22 Orang	59.978.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		22 Orang	45.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 06 04 2.01 0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial		42 Orang	37.405.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		42 Orang	44.000.000
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan rehabilitasi sosial		6 orang	20.921.300			6 Orang	30.000.000
1 06 04 2.02 0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Orang	1.200.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Orang	5.000.000
1 06 04 2.02 0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Orang	4.965.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Orang	5.000.000
1 06 04 2.02 0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Orang	14.756.300	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Orang	20.000.000
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar		100 %	15.028.950.271			100%	11.665.360.501
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi		30,00%				32,50%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		0,79%				1,58%	
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima Bansos		100 %	15.028.950.271			100%	11.665.360.501
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkatkan keterampilannya		20%				40%	
		Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun		100%				100%	
1 06 05 2.02 0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		7751 Orang	79.990.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7751 Orang	50.000.000
1 06 05 2.02 0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		80 Orang	479.849.549	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKA U (CHT)		80 Orang	479.949.549

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 06 05 2.02 0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		7751 Orang	14.469.100.722	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKA U (CHT)		7751 Orang	11.135.400.952
1 06 05 2.02 0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Orang	10.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Orang	10.000
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana		100 %	205.615.870			100 %	223.512.270
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial		100 %	52.573.770			100%	55.573.770
1 06 06 2.01 0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kab/Kota		30 Orang	34.573.770	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Orang	34.573.770

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 06 06 2.01 0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Orang	9.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Orang	9.000.000
1 06 06 2.01 0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Orang	9.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Orang	9.000.000
1 06 06 2.01 0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Orang	3.000.000
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang meningkat kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana		0.14 %	153.042.100			0.41%	167.938.500
		Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar		100%				100%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 06 06 2.02 0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		27 Orang	139.231.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		27 Orang	134.231.900
1 06 06 2.02 0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi		27 Orang	4.923.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		27 Orang	4.923.800
1 06 06 2.02 0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana		225 Orang	8.886.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		225 Orang	8.886.400
1 06 06 2.02 0011	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana				DANA ALOKASI UMUM (DAU)		225 Orang	19.896.400
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP Nasional yang terkelola dengan baik		100 %	35.000.000			100 %	35.000.000
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara		100 %	35.000.000			100%	35.000.000
1 06 07 2.01 0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada		987 Makam	35.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		989 Makam	35.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota							

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 Dinas Sosial Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, sebagai penjabaran Renstra Dinas Sosial dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2026. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

1.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai nilai yang strategis dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kota Blitar.

Renja ini disusun melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan kerangka pendanaannya, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

1.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Sosial Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2026 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

1.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi, Dinas Sosial merencanakan tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator/target indikator serta kebutuhan anggaran berpedoman pada Renja Dinas Sosial Tahun 2026.
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, pilar-pilar sosial dan seluruh stake holder dalam pelaksanaan Renja ini sehingga akan dicapai hasil kinerja yang optimal.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta program, kegiatan dan sub kegiatan sejalan dengan tuntutan perkembangan layanan bidang sosial.

Akhirnya, Rencana Kerja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2026. Program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2025 diharapkan dapat memberikan layanan dasar bidang sosial bagi PPKS yang optimal.